

LAPORAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO



BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sub Tahapan Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Mukomuko sebagaimana mestinya. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang diperoleh selama melaksanakan tahapan Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Mukomuko dari tanggal 15 Oktober s.d 4 November 2022. Penyusunan laporan ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban tim Pengawas sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten Mukomuko mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Jajaran Tim Pengawas yang membantu secara moral maupun tenaga dan pikiran selama pengawasan tahapan berlangsung. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada penyusunan laporan ini serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan laporan ini banyak kesalahannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pihak yang membutuhkan dalam pelaksanaan tahapan Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

Kordiv Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

Deny Setiabudi, SH

RINGKASAN LAPORAN

Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik di tingkat Kabupaten dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober s.d 4 November 2022 PKPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; mengamanatkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pada seluruh tahapan dalam Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
RINGKASAN LAPORAN.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum.....	5
B. Tujuan Laporan	6
C. Landasan Hukum	6
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN.....	8
1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik.....	8
a. Kerawanan-Kerawanan	8
b. Perencanaan Pengawasan.....	8
2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik.....	10
a. Pencegahan	10
b. Aktivitas Pengawasan.....	13
BAB III PENUTUP	31
A. KESIMPULAN	31
B. REKOMENDASI	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1 IKP Kabupaten Mukomuko (Kerawanan pada tahapan Verifikasi Partai Politik)	8
Tabel 2 Daftar Partai Politik Yang Sudah Memiliki Akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu Tahun 2024	13
Tabel 3 DAFTAR KLARIFIKASI KEGANDAAN EXTERNAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK	17
Tabel 4 Tabel Rekapitulasi Hasil Pengawasan pada Verifikasi Administrasi di Kabupaten Mukomuko	20
Tabel 5 HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK	22
Tabel 6 Tabel Hasil Verifikasi Administrasi	23
Tabel 7 Tabel Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik	27
Tabel 8 DATA REKAPITULASI HASIL AKHIR VERIFIKASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PEMILU 2024 DI KABUPATEN MUKOMUKO	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan Bawaslu Kabupaten menyusun dan menyampaikan laporan tugas pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu mencakup pengawasan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di masing-masing wilayah kerjanya. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel.

Adalah salahsatu tanggung jawab Bawaslu Kabupaten, guna pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa. Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Kabupaten Mukomuko yang memiliki 15 Kecamatan, 148 Desa dan 3 Kelurahan adalah Kabupaten yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 yang memiliki luas wilayah ± 4.600 KM² dengan jumlah penduduk sebanyak 174.219 Jiwa. Pada Pemilu serentak Tahun 2019 Jumlah DPT di Kabupaten Mukomuko sebanyak 126.249 dengan jumlah TPS sebanyak 567 buah TPS.

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Mukomuko secara umum berlangsung dengan baik tanpa hambatan berarti, dengan dukungan segenap stake holder yang ada di Kabupaten Mukomuko. Disamping itu

masyarakat Kabupaten Mukomuko yang majemuk dalam keberadaan kebudayaannya sudah terbiasa menghadapi kegiatan Pemilihan umum dengan menyikapi setiap hasil Pemilu dengan demokratis dan semangat membangun suasana kondusif. Dari sekian banyak pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Mukomuko hampir bisa dikatakan nihil terjadi gejolak yang berarti.

A. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Dasar Hukum Penyusunan Laporan berdasarkan Pasal 104 huruf c Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tatrapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan; Bawaslu Kabupaten Mukomuko diwajibkan menyampaikan pelaksanaan tahapan penagwasan Pemilu kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Propinsi Bengkulu.

B. Tujuan Laporan

Maksud dan Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyampaikan semua proses kinerja pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai politik yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Mukomuko, dari Verifikasi Faktual kepengurusan sampai dengan Verifikasi Keanggotaan dan juga salah satu Bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Mukomuko dalam menyampaikan hasil laporan Pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Mukomuko.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Surat Edaran 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

a. Kerawanan-Kerawanan

Kerawanan-Kerawanan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik antara lain:

- 1) Kerawanan Tidak terpenuhinya kuota perempuan pada kepengurusan;
- 2) Kepengurusan dan keanggotaan ganda partai politik;
- 3) Identifikasi hubungan kekerabatan dengan Penyelenggara;
- 4) Keberadaan gedung sekretariat yang sering berpindah-pindah;
- 5) Dualisme kepengurusan ditingkat Kabupaten;
- 6) Adanya ASN, TNI dan POLRI yang menjadi Anggota Parpol
- 7) Adanya pencatutan nama anggota Parpol oleh Partai Politik.
- 8) Aplikasi Sipol yang bermasalah;
- 9) Pembatasan menu pada akses Sipol untuk Bawaslu

Sedangkan skor IKP Kabupaten Mukomuko berdasarkan variabel dimensi dan sub dimensi yang bersumber dari Bawaslu RI pada tahapan Verifikasi Partai Politik terdapat pada variabel kerawanan sedang.

Tabel 1 IKP Kabupaten Mukomuko (Kerawanan pada tahapan Verifikasi Partai Politik)

Variabel Dimensi Subdimensi	Variabel Dimensi Subdimensi	Variabel Dimensi Subdimensi	SKOR	KATEGORI
Kerawanan Pemilu	Kontestasi	Hak politik terkait gender	50,00	Kerawanan Sedang
		Representasi minoritas	50,00	Kerawanan Sedang
	Partisipasi	Partisipasi Partai	40,54	Kerawanan Sedang
		Partisipasi publik	42,86	Kerawanan Sedang

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2019

b. Perencanaan Pengawasan

Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Mukomuko dalam menghadapi kegiatan pengawasan verifikasi peserta

Pemilu Tahun 2022 di Kabupaten Mukomuko sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2022, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Mukomuko, melakukan korespondensi dengan partai politik ditingkat Kabupaten Mukomuko;
- b. Melakukan rapat dan briefing dengan staf pada saat akan melakukan pengawasan dan melaporkan setiap hasilnya setelah melakukan pengawasan.
- c. Mempersiapkan alat kerja pengawasan.
- e. Pembentukan Tim Pengawas Verifikasi
Dalam rapat awal ditentukan terlebih dahulu tim dan petugas pengawas yang akan menjadi bagian atau elemen. Pembagian tugas perlu mengingat banyak proses verifikasi yang akan dilakukan secara simultan dan serentak di KPU Mukomuko.
- f. Kordinasi dengan KPU Mukomuko
Langkah koordinasi melalui pertemuan langsung unsur pimpinan Bawaslu Kabupaten Mukomuko dengan unsur pimpinan KPU Mukomuko juga merupakan bagian yang diperhatikan, untuk terjalinnya komunikasi dalam pelaksanaan pengawasan kedepan.
- g. Upgrading Terhadap Peraturan
Selain untuk ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, payung hukum turunan yang menyangkut teknis pelaksanaan verifikasi terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta sumber ketentuan lainnya.
- h. Analisis Alat Kerja
Sebagai bekal dan pedoman dalam pengawasan dilapangan, Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah dibekali oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu alat kerja dalam bekerja, agar terdapat sinkronisasi antar individu dalam melakukan pengawasan, pembahasan alat kerja menjadi salahsatu kunci suksesnya pengawasan.
Guna efektifitas pengawasan kejenjang Panwaslucam, alat kerja Bawaslu Provinsi Bengkulu didesain sedemikian rupa agar sesuai kebutuhan pada tingkat Kecamatan.
- i. Identifikasi Tantangan dalam Pengawasan

Guna meminimalisir hambatan dalam pengawasan verifikasi, dilakukan pemetaan masalah yang akan dihadapi oleh petugas pengawas dilapangan, seperti ketidakpatuhan Partai Politik terhadap jadwal pelaksanaan, Akses data SIPPOL yang lambat, petugas pengawas yang tidak memahami teknis pelaksanaan verifikasi, ketidakjelasan alamat Parpol di Kabupaten Mukomuko, faktor geografis, ketidaksiapan anggota Parpol yang akan dilakukan verifikasi faktual serta hal teknis lainnya.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

a. Pencegahan

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Pengawasan terhadap ketaatan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud, difokuskan pada:

1. kebenaran dan ketepatan pada proses;
2. keterbukaan dan transparansi pada proses;
3. validitas Data Dari Peserta;
4. ketepatan waktu proses;
5. ketidakberpihakan terhadap partai politik manapun; dan
6. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.

Upaya - upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko, antara lain adalah:

- a. Memberikan saran secara langsung terhadap KPU Mukomuko yang mengatur tentang pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
- b. Melakukan koordinasi baik secara informal maupun formal dengan KPU Mukomuko dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
- c. Menyampaikan pencegahan dini kepada KPU Mukomuko dan partai politik agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

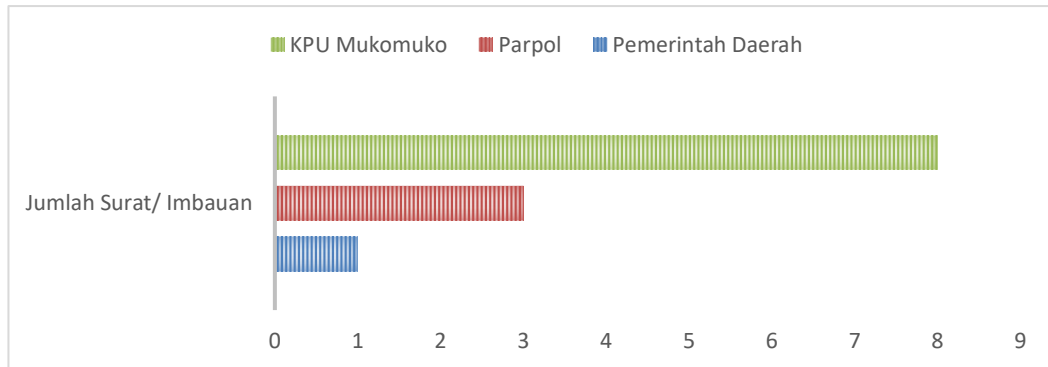
undangan mengenai pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;

Pencegahan dalam bentuk surat:

1. Surat Himbauan Kepada KPU Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 05/PM.00.02/K/07/2022 tertanggal 13 Juli 2022 perihal Mensosialisasikan kepada Partai Politik yang akan menjadi Calon Peserta Pemilu 2024
2. Surat Himbauan Kepada Pemerintah Daerah tertuju kepada Bupati Kabupaten Mukomuko Selaku Kepala Pemerintahan dengan Nomor 06/PM.00.02/K/08/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 Perihal Agar Pemerintah Daerah Meningkatkan Peran Serta Menjaga Kondusifitas Suasana dalam Menghadapai Tahapan Pemilu tahun 2024 dan menjaga Netralitas dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024
3. Surat Himbauan Kepada Seluruh Partai Politik dengan Nomor Surat 07/PM.00.02/K/08/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 Perihal Agar meningkatkan peran serta dalam menjaga kondusifitas suasana dalam menghadapi tahapan Pemilu tahun 2024
4. Surat Himbauan Kepada KPU Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 56/KA.00.02/K/08/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 terkait Proses Verifikasi Administrasi status ke anggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024
5. Surat Bawaslu Kabupaten Mukomuko tujuan kepada KPU Mukomuko dengan Nomor 10/PM.00.02/K/09/2022 pada tanggal 8 September 2022 perihal untuk memberi penjelasan terkait aturan tentang Klarifikasi keanggotaan Partai Politik melalui media daring/ Video Call
6. Surat Saran Perbaikan kepada KPU Mukomuko dengan Nomor 11/PM.00.02/K/09/2022 pada tanggal 8 September 2022 terhadap verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 melalui Video Call Via platform whatshap. agar KPU Kabupaten Mukomuko melaksanakan ketentuan klarifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022
7. Surat Himbauan Kepada KPU Kabupaten Mukomuko dengan nomor 15/PM.00.02/K/09/2022 Pada Tanggal 28 September 2022 Perihal sehubungan dengan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik.

8. Surat himbauan dan permintaan penjelasan Kepada KPU Kabupaten Mukomuko dengan Nomor :16/PM.00.02/K/09/2022 pada tanggal 29 september 2022 terkait melakukan klarifikasi secara langsung dengan menghadiri Masyarakat yang mengajukan tanggapan dan mempertemukan dengan partai Politik di kantor KPU Kabupaten Mukomuko
9. Surat himbauan kepada partai politik Calon peserta Pemilu tahun 2024 Se-Kabupaten Mukomuko dengan Nomor: 18/PM.00.02/K/10/2022 pada tanggal 6 Oktober 2022 Sehubungan tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan Parpol tingkat Kabupaten
10. Surat Himbauan Kepada KPU Kabupaten Mukomuko dengan nomor 19/PM.00.02/K/10/2022 Pada tanggal 7 Oktober 2022 sehubungan akan dilaksanakannya Verifikasi Faktual Kepengurusan dan keanggotaan Partai politik tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Mukomuko
11. Surat himbauan Kepada KPU kabupaten Mukomuko dengan Nomor :22/PM/00.02/K/10/2022 pada tanggal 12 Oktober 2022 sehubungan dengan akan dilaksanakannya Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada calon peserta (parpol) terkait jadwal pelaksanaan, sample keanggotaan yang akan dilakukan Verifikasi Faktual, metode dan mekanisme Pelaksanaan verifikasi Faktual
12. Surat himbauan Kepada KPU kabupaten Mukomuko dengan surat Nomor : 23/PM.00.02/K/10/2022 pada tanggal 3 November 2022 sehubungan dengan masa berakhirnya Verifikasi Faktual dengan memaksimalkan penggunaan sarana Panggilan Video (video call) dan konferensi video (zoom meeting)
13. Surat himbauan Kepada KPU kabupaten Mukomuko dengan surat nomor :26/PM.00.02/K/11/2022 pada tanggal 24 November 2022 sehubungan tahapan Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 disampaikan himbauan agar KPU Kabupaten Mukomuko melakukan Verifikasi Faktual dengan memaksimalkan penggunaan sarana Panggilan Video (video call) dan konferensi video (zoom meeting)

Grafik 1 Grafik Jumlah Surat/ dan Imbauan Bawaslu Kabupaten Mukomuko



b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah mengambil langkah dalam menghadapi pelaksanaan verifikasi partai politik ditingkat Kabupaten Mukomuko dengan melakukan berbagai persiapan, pelaksanaan rapat internal unsur pimpinan Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah dilakukan dengan bersama-sama seluruh staf guna memformulasikan tata kerja pengawasan.

Perbaikan Administrasi oleh Partai Politik Penerimaan perbaikan salinan yang berkewajiban menyampaikan perbaikan adalah 9 partai politik, pada saat perbaikan terdapat 6 partai politik yang menyampaikan perbaikan salinan bukti keanggotaan partai politik di Kabupaten Mukomuko

1. Aktivitas Pengawasan Verifikasi Administrasi

Tabel 2 Daftar Partai Politik Yang Sudah Memiliki Akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu Tahun 2024

No	Nama Partai Politik	Keterangan
1	Partai Golongan Karya	Sudah Memiliki Akun Sipol
2	Partai Bhinneka Indonesia	Sudah Memiliki Akun Sipol
3	Partai Hati Nurani Rakyat	Sudah Memiliki Akun Sipol
4	Partai Bulan Bintang	Sudah Memiliki Akun Sipol
5	Partai Swara Rakyat Indonesia	Sudah Memiliki Akun Sipol
6	Partai Rakyat Adil Makmur	Sudah Memiliki Akun Sipol
7	Partai Persatuan Indonesia	Sudah Memiliki Akun Sipol
8	Partai Demokrat	Sudah Memiliki Akun Sipol
9	Partai Nasdem	Sudah Memiliki Akun Sipol
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sudah Memiliki Akun Sipol

No	Nama Partai Politik	Keterangan
11	Partai Solidaritas Indonesia	Sudah Memiliki Akun Sipol
12	Partai Keadilan dan Persatuan	Sudah Memiliki Akun Sipol
13	Partai Ummat	Sudah Memiliki Akun Sipol
14	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Sudah Memiliki Akun Sipol
15	Partai Kebangkitan Nusantara	Sudah Memiliki Akun Sipol
16	Partai Pandu Bangsa	Sudah Memiliki Akun Sipol
17	Partai Persatuan Pembangunan	Sudah Memiliki Akun Sipol
18	Partai Republikku Indonesia	Sudah Memiliki Akun Sipol
19	Partai Keadilan Sejahtera	Sudah Memiliki Akun Sipol
20	Partai Pergerakan Kebangkitan Desa	Sudah Memiliki Akun Sipol
21	Partai Garda Perubahan Indonesia	Sudah Memiliki Akun Sipol
22	Partai Gerakan Indonesia Raya	Sudah Memiliki Akun Sipol
23	Partai Amanat Nasional	Sudah Memiliki Akun Sipol
24	Partai Negeri Daulat Indonesia	Sudah Memiliki Akun Sipol
25	Partai Buruh	Sudah Memiliki Akun Sipol
26	Partai Berkarya	Sudah Memiliki Akun Sipol
27	Partai Kebangkitan Bangsa	Sudah Memiliki Akun Sipol
28	Partai Reformasi	Sudah Memiliki Akun Sipol
29	Partai Kedaulatan	Sudah Memiliki Akun Sipol
30	Partai Republik	Sudah Memiliki Akun Sipol
31	Partai Mahasiswa Indonesia	Sudah Memiliki Akun Sipol
32	Partai Pelita	Sudah Memiliki Akun Sipol
33	Partai Pemersatu Bangsa	Sudah Memiliki Akun Sipol
34	Partai Rakyat	Sudah Memiliki Akun Sipol
35	Partai Damai Kasih Bangsa	Sudah Memiliki Akun Sipol
36	Partai Demokrasi Rakyat Indonesia	Sudah Memiliki Akun Sipol
37	Partai Damai Sejahtera Pembahasan	Sudah Memiliki Akun Sipol
38	Partai Republik Satu	

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Berdasarkan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh petugas/ operator verifikasi KPU Kabupaten Mukomuko yang dimulai sejak tanggal 16 Agustus 2022 s.d 6 September 2022, KPU Kabupaten Mukomuko melakukan klarifikasi terkait Proses Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda External dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Parpol serta pengawasan Klarifikasi langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya.

Pada tanggal 5 September 2022 bertempat di KPU Kabupaten Mukomuko, Tim klarifikasi KPU Kabupaten Mukomuko melakukan klarifikasi terhadap 56 (lima puluh enam) keanggotaan dari 15 (lima belas) PARPOL yang ganda yang belum diketahui statusnya.

Berdasarkan data terdapat data kegandaan external antar partai politik sebanyak 56 nama dari 15 Parpol, antara lain :

1. Partai Demokrat
2. Partai Gelora
3. Partai Nasdem
4. Partai PSI
5. Partai PAN
6. Partai PBB
7. Partai Buruh
8. Partai Golkar
9. Partai PKP
10. Partai PDI.Perjuangan
11. Partai Perindo.
12. Partai PKS
13. Partai PPP
14. Partai PRIMA
15. Partai UMMAT

**Tabel 3 DAFTAR KLARIFIKASI KEGANDAAN EXTERNAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
DI KPU KABUPATEN MUKOMUKO**

No	Hari/ Tanggal	Waktu Kedatangan	Nama Pengurus/ LO	Nama yang di Klarifikasi	Kegandaan External Antar Parpol		Nama yang Melakukan Klarifikasi	Bentuk Klarifikasi	Hasil Klarifikasi
1	Senin, 5 September 2022	Jam 16.00 WIB	Muhamad Isbowo Afandi	Muhamad Isbowo Afandi	Partai Nasdem	Partai Demokrat	Bardansyah Pohan	Langsung	Bahwa yang bersangkutan A.n Muhamad Isbowo Afandi menyatakan bahwa dia masuk keanggotaan Partai Nasdem. dan harus di TMS kan di Partai Demokrat
2	Senin, 5 September 2022	Jam 16.59 WIB	Sakonda Ariadi	Tiya Rahma Dewi	Partai PKS	PSI	Bardansyah Pohan	Langsung	Bahwa yang bersangkutan A.n Tiya Rahma Dewi menyatakan bahwa dia masuk keanggotaan Partai PKS. dan harus di TMS kan di Partai PSI
3	Senin, 5 September 2022	Jam 18.00 WIB	Afri Zulpan	Marwan Syahrin	Partai Perindo	Partai Buruh	Bardansyah Pohan	Langsung	Bahwa yang bersangkutan A.n Marwan Syahrin menyatakan bahwa dia masuk keanggotaan Partai Perindo. dan harus di TMS kan di Partai Buruh

No	Hari/ Tanggal	Waktu Kedatangan	Nama Pengurus/ LO	Nama yang di Klarifikasi	Kegandaan External Antar Parpol		Nama yang Melakukan Klarifikasi	Bentuk Klarifikasi	Hasil Klarifikasi
4	Senin, 5 September 2022	Jam 18.19 WIB	Trisna Levia	Salman	PAN	PSI	Bardansyah Pohan	Langsung	Bahwa yang bersangkutan A.n Salman menyatakan bahwa dia masuk keanggotaan Partai PAN. dan harus di TMS kan di Partai PSI
5	Senin, 5 September 2022	Jam 19.08 WIB	S.Tommy. R	Iwan	PBB	PDI. Perjuanga n	Bardansyah Pohan	Langsung	Bahwa yang bersangkutan A.n Iwan menyatakan bahwa dia masuk keanggotaan Partai PBB. dan harus di TMS kan di Partai PDI Perjuangan
6	Senin, 5 September 2022	Jam 19.25 WIB	Trisna Levia	Muhtarudin	PAN	Partai PRIMA	Bardansyah Pohan	Langsung	Bahwa yang bersangkutan A.n Muhtarudin menyatakan bahwa dia masuk keanggotaan Partai PAN. dan harus di TMS kan di Partai PRIMA
7	Senin, 5 September 2022	Jam 19.30 WIB	Afri Zulpan	Triyani	Partai Perindo	Partai Nasdem	Bardansyah Pohan	Langsung	Bahwa yang bersangkutan A.n Triyani menyatakan bahwa dia masuk keanggotaan Partai Perindo. dan harus di TMS kan di Partai Nasdem

No	Hari/ Tanggal	Waktu Kedatangan	Nama Pengurus/L O	Nama yang di Klarifikasi	Kegandaan External Antar Parpol		Nama yang Melakukan Klarifikasi	Bentuk Klarifikasi	Hasil Klarifikasi
8	Senin, 5 September 2022	Jam 20.50 WIB	Rusman Aswardi	Tubagus Wahyudi	PPP	Partai Demokrat	Nova Arianti	Langsung	Bahwa yang bersangkutan A.n Tubagus Wahyudi menyatakan bahwa dia masuk keanggotaan Partai PPP. dan harus di TMS kan di Partai Demokrat
9	Senin, 5 September 2022	Jam 21.12 WIB	Jumoharjo	-	PSI	-	-		Bahwa LO/ Penghubung Partai PSI tidak bisa menghadirkan yang bersangkutan untuk di lakukan klarifikasi
10	Senin, 5 September 2022	Jam 22.31 WIB	Ery Zulhayat	Ery Zulhayat	Partai Ummat	PAN	Nova Arianti	Langsung	Bahwa yang bersangkutan A.n Ery Zulhayat menyatakan bahwa dia masuk keanggotaan Partai Ummat. dan harus di TMS kan di Partai PAN

No	Hari/ Tanggal	Waktu Kedatangan	Nama Pengurus/L O	Nama yang di Klarifikasi	Kegandaan External Antar Parpol		Nama yang Melakukan Klarifikasi	Bentuk Klarifikasi	Hasil Klarifikasi
11	Senin, 5 September 2022	Jam 22.37 WIB	Hendra Jaya	Rudi Hartono	PPP	Partai Ummat	Bardansyah Pohan	Melalui Daring/ Vidio Call	Bahwa Tim klarifikasi KPU Kabupaten Mukomuko A.n Bardansyah Pohan melakukan Klarifikasi kepada Rudi Hartono yang beralamat Kecamatan Air Rami melalui Daring/ Vidio Call, dari hasil klarifikasi bahwa yang bersangkutan A.n Rudi Hartono menyatakan bahwa dia masuk ke anggotaan Partai PPP . dan harus di TMS kan di Partai Ummat

Tabel 4 Tabel Rekapitulasi Hasil Pengawasan pada Verifikasi Administrasi di Kabupaten Mukomuko

No	Kabupaten Mukomuko	Partai Politik	Jumlah yang diajukan	Jumlah potensi Ganda Internal	Jumlah potensi Ganda Eksternal	Jumlah anggota yang berpotensi TMS
1.	MUKOMUKO	PARTAI PAN	550	19	8	26
2.	MUKOMUKO	PARTAI BURUH	832	148	0	147
3.	MUKOMUKO	PARTAI GARUDA PERUBAHAN INDONESIA	492	2	1	3
4.	MUKOMUKO	PARTAI GOLKAR	498	23	11	33

No	Kabupaten Mukomuko	Partai Politik	Jumlah yang diajukan	Jumlah potensi Ganda Internal	Jumlah potensi Ganda Eksternal	Jumlah anggota yang berpotensi TMS
5.	MUKOMUKO	PARTAI DEMOKRAT	238	2	1	3
6.	MUKOMUKO	PARTAI PKN	785	709	313	709
7.	MUKOMUKO	PARTAI PKB	317	6	3	9
8.	MUKOMUKO	PARTAI PSI	265	0	0	0
9.	MUKOMUKO	PARTAI PRIMA	205	4	2	5
10.	MUKOMUKO	PARTAI PDIP	322	6	4	8
11.	MUKOMUKO	PARTAI HANURA	250	6	3	9
12.	MUKOMUKO	PARTAI REPUBLIK	200	6	2	8
13.	MUKOMUKO	PARTAI GERINDRA	412	0	7	7
14.	MUKOMUKO	PARTAI PERINDO	303	6	3	9
15.	MUKOMUKO	PARTAI UMAT	509	32	14	46
16.	MUKOMUKO	PARTAI Keadilan Persatuan	209	2	0	2
17.	MUKOMUKO	PARTAI Keadilan Sejahtera	208	0	0	0
18.	MUKOMUKO	PARTAI REPUBLIKU INDONESIA	193	8	4	12
19.	MUKOMUKO	PARTAI PPP	313	40	17	57
20.	MUKOMUKO	PARTAI GELORA	281	49	24	73
21.	MUKOMUKO	PARTAI NASDEM	283	16	8	24
22.	MUKOMUKO	PARTAI PBB	205	7	175	182
23.	MUKOMUKO	PARTAI REPUBLIK SATU	266	8	4	12
24.	MUKOMUKO	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA	889	740	123	740

Tabel 5 HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

No	Nama Partai Politik	Jumlah Anggota yang di ajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS	MS		KETERANGAN
1	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	303	278	24	1	278		TERPENUHI
2	Partai Ummat	509	435	48	26	435		TERPENUHI
3	Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)	889	0	0	889	0		BELUM TERPENUHI
4	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	265	139	118	8	139		BELUM TERPENUHI
5	Partai Republik Indonesia (Partai Republik)	193	0	1	192	0		BELUM TERPENUHI
6	Partai Republik Satu (Republik Satu)	266	0	0	266	0		BELUM TERPENUHI
7	Partai Republik (Republik)	200	0	200	0	0		BELUM TERPENUHI
8	Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)	205	155	26	24	155		BELUM TERPENUHI
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	313	13	255	45	13		BELUM TERPENUHI
10	Partai Nasdem (Nasdem)	283	78	176	29	78		BELUM TERPENUHI
11	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	784	408	7	370	408	15	TERPENUHI
12	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	317	218	55	44	218	15	TERPENUHI
13	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	208	175	32	1	175		BELUM TERPENUHI
14	Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP)	209	0	192	15	0		BELUM TERPENUHI
15	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	250	159	67	24	159		BELUM TERPENUHI

No	Nama Partai Politik	Jumlah Anggota yang di ajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS	MS		KETERANGAN
16	Partai Golongan Karya (Golkar)	498	400	75	23	400	15	TERPENUHI
17	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	412	320	54	38	320	15	TERPENUHI
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)	281	119	109	53	119		BELUM TERPENUHI
19	Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	501	456	1	35	456	15	TERPENUHI
20	Partai Demokrat	238	209	15	14	209	15	TERPENUHI
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	322	197	111	14	197	15	TERPENUHI
22	Partai Buruh	832	663	70	99	663	15	TERPENUHI
23	Partai Bulan Bintang	205	167	25	13	167		BELUM TERPENUHI
24	Partai Amanat Nasional (PAN)	528	263	129	136	263	15	TERPENUHI

Tabel 6 Tabel Hasil Verifikasi Administrasi

No	PARTAI	Keanggotaan		Keterangan	
		Jumlah Anggota di ajukan	Jumlah Anggota MS		
		1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	303	300
2	PARTAI UMMAT	509	452	Terpenuhi	Faktual

No	PARTAI	Keanggotaan		Keterangan	
		Jumlah Anggota	Jumlah Anggota		
		di ajukan	MS		
3	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA (PARSINDO)	889	0	Tidak Terpenuhi	
4	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	265	305	Terpenuhi	Faktual
5	PARTAI REPUBLIKU INDONESIA (PARTAI REPUBLIKU)	193	0	Tidak Terpenuhi	
6	PARTAI REPUBLIK SATU (REPUBLIK SATU)	266	0	Tidak Terpenuhi	
7	PARTAI REPUBLIK (REPUBLIK)	200	0	Tidak Terpenuhi	
8	PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (PRIMA)	205	226	Terpenuhi	Faktual
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	313	228	Terpenuhi	
10	PARTAI NASDEM (NASDEM)	283	406	Terpenuhi	
11	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	784	410	Terpenuhi	Faktual
12	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	317	263	Terpenuhi	
13	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	208	280	Terpenuhi	
14	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP)	209	180	Tidak Terpenuhi	
15	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	250	226	Terpenuhi	Faktual
16	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	498	421	Terpenuhi	
17	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (PARTAI GERINDRA)	412	333	Terpenuhi	
18	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA INDONESIA)	281	191	Terpenuhi	Faktual
19	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (PARTAI GARUDA)	502	466	Terpenuhi	Faktual
20	PARTAI DEMOKRAT	238	247	Terpenuhi	
21	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)	322	299	Terpenuhi	
22	PARTAI BURUH	832	691	Terpenuhi	Faktual
23	PARTAI BULAN BINTANG	205	225	Terpenuhi	Faktual

No	PARTAI	Keanggotaan		Keterangan	
		Jumlah Anggota	Jumlah Anggota		
		di ajukan	MS		
24	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	528	267	Terpenuhi	

2. Aktivitas Pengawasan Verifikasi Faktual

1. Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan

a) Verifikasi faktual Kepengurusan

Verifikasi faktual Kepengurusan dilakukan dari tanggal 16-17 Oktober 2022 dengan cara KPU mendatangi Kantor Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten untuk mencocokkan kesesuaian alamat kantor, Kepengurusan, KTP-EL, Kartu Tanda Anggota (KTA), dan Kepengurusan Parpol dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. dan di tingkat Kabupaten Verifikasi Faktual Kepengurusan dilakukan Selama 2 yaitu dari tanggal 16 s.d 17 Oktober 2022 terhadap 9 parpol yaitu diantaranya PBB, Partai Garuda, Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Perindo, PSI dan Partai Buruh.

KPU Kabupaten Mukomuko melakukan Verifikasi Faktual dengan cara mendatangi Kantor Tetap Partai Politik ditingkat kabupaten yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara di tingkat Kabupaten hal tersebut sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik ditingkat pusat yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK

Sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2022, Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan yang bersangkutan tidak hadir maka Verifikasi Faktual kepengurusan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi atau video call, Pengurus tersebut tidak hadir dan tidak bisa di hubungi melalui video call maka statusnya BMS.

Sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2022 Dalam hal video call terdapat keraguan terhadap data Pengurus Partai Politik tersebut, KPU dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP atau KK, untuk melihat dan memastikan kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2022 Pada saat Verifikasi Faktual yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas saat Faktual, status pengurus tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS).

Sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2022 Pada saat Faktual Pengurus Partai Politik tidak dapat menunjukkan identitasnya, maka dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS).

Sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2022, Pengurus Partai Politik yang telah meninggal dunia, apabila pengurus tersebut meninggal sejak masa pendaftaran berarti dari 1 s.d 14 Agustus 2022, yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia dari lurah/kepala desa maka pengurus tersebut dinyatakan Memenuhi Sarat (MS). Jika pengurus tersebut meninggal dunia sebelum pendaftaran maka dinyatakan TMS

b) Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada susunan Pengurus Partai Politik

Sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2022, Pada saat dilakukan Faktual keterwakilan Perempuan tersebut tidak bisa hadir maka dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi atau video call.

Sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2022, Pada saat faktual tidak keterwakilan perempuan tidak memenuhi 30%, maka status tersebut dinyatakan Memenuhi Sarat (MS). Karena ini sifatnya tidak wajib.

c) Domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik

Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu jika pada saat Verifikasi Faktual domisili Kantor tidak sesuai dengan peraturan, maka status Kantor tetap tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat.

Tabel 7 Tabel Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik

No	Partai	Fokus Pengawasan Kebenaran Keberadaan Kantor Tetap			Temuan Lainnya
		Kantor Tidak Ada	Isi Kantor Kosong	Kantor Tidak sesuai dengan alamat pada MODEL F-KANTOR TETAP-PARPOL	
1	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	-	-	√	Status Kantor yang di faktual dengan di sipol berbeda, di sipol terdapat keterangan status kantor Tetap, namun setelah dilakukan Vaktual dan melihat dari surat keterangan domisili ternyata status kantor masih

No	Partai	Fokus Pengawasan Kebenaran Keberadaan Kantor Tetap			
		Kantor Tidak Ada	Isi Kantor Kosong	Kantor Tidak sesuai dengan alamat pada MODEL F-KANTOR TETAP-PARPOL	Temuan Lainnya
					sewa dan hasil faktual kantor tersebut dinyatakan Belum Memenuhi Sarat (BMS)
2	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	-	-
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	-	-
4	Partai Buruh	-	-	√	Status Kantor yang di faktual dengan di sipol berbeda, di sipol terdapat alamat kantor cuma sebatas menyebutkan menyebutkan desa tempat kantor, sedangkan di alamat surat domisil menyebutkan lengkap dengan anama jalan alamat kantor tersebut dan status kantor tersebut dinyatakan Belum Memenuhi Sarat (BMS)
5	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	-	-	-	-
6	Partai Gelora Indonesia	-	-	-	-
7	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	-	-	√	Status Kantor yang di faktual dengan di sipol berbeda, di sipol terdapat alamat kantor cuma sebatas menyebutkan kecamatan dan tidak menyebutkan desa tempat kantor, sedangkan di alamat surat domisil menyebutkan lengkap nama desa lubuk pinang, kecamatan lubuk pinang dan status kantor tersebut dinyatakan Belum Memenuhi Sarat (BMS)
8	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	-	-	-	-
9	Partai Ummat	-	-	-	-

3. Aktivitas Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan

Tabel 8 DATA REKAPITULASI HASIL AKHIR VERFAK KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PEMILU 2024 DI KABUPATEN MUKOMUKO

No	Nama Partai Politik	Jumlah Syarat Dukungan Minimal Keanggotaan	Jumlah Total Sampling Verfak Keanggotaan	Keanggotaan hasil Sampling MS	Keanggotaan Hasil Sampling TMS	Keterangan Parpol (MS/TMS)
1	PERINDO	190	169	120	49	MS
2	UMMAT	190	209	109	100	MS
3	PSI	190	197	143	54	MS
4	PKN	190	217	109	108	MS
5	HANURA	190	143	127	16	MS
6	GELORA INDONESIA	190	128	127	1	MS
7	GARUDA	190	204	102	102	MS
8	BURUH	190	247	78	169	MS
9	BULAN BINTANG	190	105	93	12	MS

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

a. Temuan

Tidak ada temuan dalam pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik.

b. Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi dalam pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak ada Tindaklanjut Rekomendasi dalam pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

1. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub tahapan Verifikasi partai Politik

Dinamika pengawasan Tahapan dan Sub tahapan Verifikasi partai Politik terjadi akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan setiap partai politik lama melakukan proses verifikasi faktual.

Penggunaan media atau alat komunikasi dalam proses verifikasi bisa dikatakan sangat membantu dalam proses pelaksanaan.

Terdapat keanggotaan partai politik yang tidak mengetahui sama bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam keanggotaan partai politik, tidak jarang dalam pengawasan menemukan adanya masyarakat yang takut dan curiga kedatangan petugas dan pengawasn verifikasi partai politik.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Tahapan

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Verifikasi Partai Politik. Evaluasi terhadap ketentuan yang mengatur keanggotaan, bahwa keanggotaan partai politik perlu dibuat surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Perlu pengaturan jadwal yang membagi waktu dalam proses penerimaan berkas dan perbaikan berkas kepada KPU, guna menghindari situasi pendaftaran dan perbaikan di akhir-akhir waktu.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Mukomuko telah berlangsung dengan lancar tidak terdapat kendala yang sangat berarti, kesimpulan pelaksanaan selama pengawasan Verifikasi Faktual dapat kami sampaikan berikut :

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Mukomuko terdapat kesulitan partai politik dalam menghadirkan pendukung partai politik untuk dilakukan verifikasi faktual, seperti tidak tersedianya sarana kantor tetap sehingga sulit melakukan korespondensi apabila ada hal-hal yang disampaikan.
- 2) Banyaknya penyalahgunaan data/identitas individu oleh Peserta Pemilu ke dalam SIPOL

B. REKOMENDASI

1. Agar kedepan Peraturan Bawaslu terkait dengan Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu serempak terbitnya dengan peraturan KPU terkait hal yang sama.
2. Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran tentang peraturan ditingkat bawah agar dilakukan rapat koordinasi bersama antara Bawaslu dan KPU ditingkat Kabupaten.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Himbauan Kepada KPU Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 05/PM.00.02/K/07/2022 tertanggal 13 Juli 2022 perihal Mensosialisasikan kepada Partai Politik yang akan menjadi Calon Peserta Pemilu 2024
2. Surat Himbauan Kepada Pemerintah Daerah tertuju kepada Bupati Kabupaten Mukomuko Selaku Kepala Pemerintahan dengan Nomor 06/PM.00.02/K/08/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 Perihal Agar Pemerintah Daerah Meningkatkan Peran Serta Menjaga Kondusifitas Suasana dalam Menghadapai Tahapan P`emilu tahun 2024 dan menjaga Netralitas dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024
3. Surat Himbauan Kepada Seluruh Partai Politik dengan Nomor Surat 07/PM.00.02/K/08/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 Perihal Agar meningkatkan peran serta dalam menjaga kondusifitas suasana dalam menghadapi tahapan Pemilu tahun 2024
4. Surat Himbauan Kepada KPU Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 56/KA.00.02/K/08/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 terkait Proses Verifikasi Administrasi status ke anggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024
5. Surat Bawaslu Kabupaten Mukomuko tujuan kepada KPU Mukomuko dengan Nomor 10/PM.00.02/K/09/2022 pada tanggal 8 September 2022 perihal untuk memberi penjelasan terkait aturan tentang Klarifikasi keanggotaan Partai Politik melalui media daring/ Video Call
6. Surat Saran Perbaikan kepada KPU Mukomuko dengan Nomor 11/PM.00.02/K/09/2022 pada tanggal 8 September 2022 terhadap verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 melalui Video Call Via platform whatshap. agar KPU Kabupaten Mukomuko melaksanakan ketentuan klarifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022
7. Surat Himbauan Kepada KPU Kabupaten Mukomuko dengan nomor 15/PM.00.02/K/09/2022 Pada Tanggal 28 September 2022 Perihal sehubungan dengan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik.
8. Surat himbauan dan permintaan penjelasan Kepada KPU Kabupaten Mukomuko dengan Nomor :16/PM.00.02/K/09/2022 pada tanggal 29

september 2022 terkait melakukan klarifikasi secara langsung dengan menghadiri Masyarakat yang mengajukan tanggapan dan mempertemukan dengan partai Politik di kantor KPU Kabupaten Mukomuko

9. Surat himbauan kepada partai politik Calon peserta Pemilu tahun 2024 Se-Kabupaten Mukomuko dengan Nomor: 18/PM.00.02/K/10/2022 pada tanggal 6 Oktober 2022 Sehubungan tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan Parpol tingkat Kabupaten
10. Surat Himbauan Kepada KPU Kabupaten Mukomuko dengan nomor 19/PM.00.02/K/10/2022 Pada tanggal 7 Oktober 2022 sehubungan akan dilaksanakannya Verifikasi Faktual Kepengurusan dan keanggotaan Partai politik tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Mukomuko
11. Surat himbauan Kepada KPU kabupaten Mukomuko dengan Nomor :22/PM/00.02/K/10/2022 pada tanggal 12 Oktober 2022 sehubungan dengan akan dilaksanakannya Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada calon peserta (parpol) terkait jadwal pelaksanaan, sample keanggotaan yang akan dilakukan Verifikasi Faktual, metode dan mekanisme Pelaksanaan verifikasi Faktual
12. Surat himbauan Kepada KPU kabupaten Mukomuko dengan surat Nomor : 23/PM.00.02/K/10/2022 pada tanggal 3 November 2022 sehubungan dengan masa berakhirnya Verifikasi Faktual dengan memaksimalkan penggunaan sarana Panggilan Video (video call) dan konferensi video (zoom meeting)
13. Surat himbauan Kepada KPU kabupaten Mukomuko dengan surat nomor :26/PM.00.02/K/11/2022 sehubungan tahapan Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 disampaikan himbauan agar KPU Kabupaten Mukomuko melakukan Verifikasi Faktual dengan memaksimalkan penggunaan sarana Panggilan Video (video call) dan konferensi video (zoom meeting) dengan surat nomor :26/PM.00.02/K/11/2022.